

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA



**DEVIANTY SRIAYU
1210321040**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**DEVIANTY SRIAYU
1210321040**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

DEVIANTY SRIAYU
1210321040

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 19 September 2016

Pembimbing



Herawati Dahlan, S.E., M.Ak

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Afdal, S.E., M.Sc., Ak., C.A

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

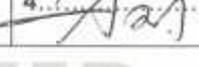
disusun dan diajukan oleh

DEVIANTY SRIAYU
12103210240

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 September 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Herawai Dahlan, S.E., M.Ak	Ketua	1. 
2.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si., Ak	Sekretaris	2. 
3.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si	Anggota	3. 
4.	Drs. Syamsuddin Bidol, M.Si	Eksternal	4. 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Afdal, S.E., M.Sc., Ak., C.A

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DEVIANTY SRIAYU
NIM : 1210321040
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kontribusi Dan Perkembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toraja Utara** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Devianty Sriayu

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kontribusi dan Perkembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara**” sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Strata Satu Program Studi Akuntansi di Universitas Fajar Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Welem Rente dan Ibunda Agus Tiku yang telah merawat dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa, bantuan moril dan materil yang tidak ternilai kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Jabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Fajar;
2. Ibu Dra. Hj. Hadiati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;
3. Bapak Afdal, S.E., M.Sc., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
4. Ibu Herawati Dahlan, S.E., M.Ak selaku Pembimbing skripsi. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa penulisan skripsi;

5. Seluruh Dosen, Penasehat Akademik dan segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar;
6. Sahabat penulis “Pejuang Toga” dan teman satu persekutuan di gereja yang selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, masukan yang begitu berharga yang selalu hadir menemani dalam suka dan duka;
7. Kepada teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2012 Universitas Fajar dan teman-teman seperjuangan khususnya kelas A (Inna, Nensi, Ridha, Anggi, Dilla, Rahma, Vivi, Fatma, Melan, Radiah, Desri, Sarni, Arnol, Toni, Irba, Ipul, Epsy, Aswan, Didit, Mimin) yang telah bersama berjuang baik suka dan duka.
8. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, September 2016

Peneliti

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR
PARIWISATA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Devianty Sriayu

Herawati Dahlan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi dan perkembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten toraja utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada data yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan pengambilan data berupa data anggaran yang dimiliki oleh PAD, data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini bertindak sebagai pencari pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data. Lokasi penelitian ini dilakukan di sekitaran tempat wisatawan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara sejak tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2015 senantiasa mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 61.283 jiwa, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 11.102 jiwa, objek wisata yang memberikan kontribusi setoran terbesar adalah objek wisata Ke'te Kesu dengan total setoran Rp 75.658.000. Disusul objek wisata budaya Londa dengan total setoran Rp45.106.000 dan Perkembangan Produk Domestik regional Bruto (PDRB), Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun terus membaik. Hal ini dapat terlihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata menuju peningkatan pengembangan pariwisata, perlu melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mendorong kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Objek-objek wisata di Kabupaten Toraja Utara masih memerlukan pembenahan fasilitas wisata, dan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara melakukan pengkajian yang dapat mendukung langkah-langkah dan kebijakan serta penyusunan program pengembangan kepariwisataan secara terpadu di Kabupaten Toraja Utara.

Kata Kunci: alokasi anggaran pariwisata, wisatawan di Kabupaten Toraja Utara, kontribusi penerimaan sektor pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata Kabupaten Toraja Utara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
1.4.1 Kegunaan Teoritis	3
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Kontribusi	5
2.2 Pengertian Pajak.....	6
2.2.1 Fungsi Pajak.....	8
2.2.2 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya	10
2.2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	11
2.2.4 Cara Pemungutan Pajak.....	12
2.2.5 Tarif Pajak	14
2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	15
2.2.7 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	16
2.2.8 Sanksi Perpajakan.....	17
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.4 Pajak Daerah	19
2.4.1 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	20

2.4.2 Pajak Daerah Yang Dipungut Oleh Provinsi	22
2.4.3 Pajak Daerah Yang Dipungut Oleh Kabupaten	22
2.5 Retribusi Daerah	24
2.5.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah	25
2.5.2 Objek Retribusi Daerah	26
2.5.3 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	26
2.5.4 Perhitungan Retribusi Daerah.....	27
2.5.5 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah	29
2.6 Sektor Pariwisata	29
2.6.1 Jenis Pariwisata	32
2.6.2 Bentuk Pariwisata.....	33
2.6.3 Daerah Tujuan Wisata.....	34
2.6.4 Pengembangan Pariwisata	37
2.6.5 Dampak Pengembangan Pariwisata.....	38
2.6.6 Faktor Yang Mendukung Peningkatan PAD dalam Sektor Pariwisata.....	39
2.6.7 Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Sektor Pariwisata.....	43
2.6.8 Peranan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan PAD	46
2.7 Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	49
2.8 Perkembangan Sektor Pariwisata	50
2.9 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Rancangan Penelitian	53
3.2 Kehadiran Peneliti	53
3.3 Lokasi Penelitian	53
3.4 Sumber Data	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	55
3.7 Pengecekan Validitas Data	55
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Profil Kabupaten Toraja Utara	57

4.2 Perkembangan Alokasi Anggaran Pariwisata dalam Belanja	
Daerah Sektor Pariwisata.....	59
4.3 Perkembangan Jumlah Wisatawan	60
4.3.1 Pelayanan Sektor Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.....	61
4.4 Perkembangan Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata	
Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Toraja Utara	62
4.5 Perkembangan PDRB Sektor Pariwisata.....	64
4.6 Potensi Sarana dan Prasarana Wisata di Kabupaten Toraja Utara	66
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Hasil Wawancara	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi dasar bagi setiap daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain.

Pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, agar pendapatan target tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah harus berupaya terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran atau penilaian

sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi.

Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak dan retribusi.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber PAD yang cukup potensial untuk dikembangkan, karena Toraja Utara kaya akan panorama dan budaya yang sangat menarik untuk dijadikan objek wisata. Sejalan dengan itu, maka sektor pariwisata ditempatkan sebagai salah satu sumber yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan ekonomi Kabupaten Toraja Utara. Dan sektor ini mulai dikenal di Toraja Utara sebagai suatu industri karena pengelolaan yang profesional dapat mendukung peningkatan produktivitas pembangunan ekonomi Toraja Utara.

Melihat hal tersebut, maka akan sangat diharapkan dukungan dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat lebih menarik minat para wisatawan yang berkunjung ke daerah Kabupaten Toraja Utara sehingga dapat menstimulasi peningkatan PAD. Meskipun tidak ada satu sektor pun yang menjadi kunci ajaib, namun dengan memberdayakan sektor tertentu yang dianggap sebagai ciri khas suatu daerah tersebut tentunya akan memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang bersangkutan dan tentunya masih memerlukan dukungan dari beberapa sektor terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: "Analisis Kontribusi dan Perkembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan alokasi anggaran pariwisata dalam belanja daerah sektor pariwisata ?
2. Bagaimana perkembangan wisatawan di Kabupaten Toraja Utara ?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Toraja Utara ?
4. Bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata Kabupaten Toraja Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan alokasi anggaran pariwisata dalam belanja daerah sektor pariwisata.
2. Untuk mengetahui perkembangan wisatawan di Kabupaten Toraja Utara.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Toraja Utara.
4. Untuk mengetahui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara) dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah Toraja Utara mengenai bagaimana mengelola sumber PAD khususnya sektor pariwisata untuk menunjang dan memaksimalkan PAD Toraja Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1992) kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah.

Pengertian Kontribusi Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan". Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000) diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan". Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping migas hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah. Dalam pemungutan pajak pemerintah berdasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak, sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara. Pajak menjadi alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Beberapa ahli mendefinisikan pajak berdasarkan sudut pandang mereka diantaranya Waluyo (2011) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Supramono (2010) sebagai berikut “Pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak langsung dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) “Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/ Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). Cara pemungutan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut terbentuk karena sistem yang berlaku dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan dari masing-masing pajak yang dikelola oleh negara mempunyai tata cara dan prosedur yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya dibedakan secara tegas antara pajak langsung dan pajak tidak langsung.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur bertitik tolak pada defenisi pajak yang diberikan oleh para pakar, memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.2 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat & Pemungutannya

Menurut Waluyo (2011) pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok:

a. Menurut Golongan

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifatnya, maksudnya pembedaan dan pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Pemungutan

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Perhotelan, Pajak Restoran.

2.2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2011) bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainly*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat

wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.2.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) ada 3 cara pemungutan pajak, yaitu:

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. pemerintah (*fiscus*) menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiscus*.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5 Tarif Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tabel 2.1 Tarif progresif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000	15 %
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25 %
Di atas Rp 500.000.000	30 %

Sumber: Mardiasmo, 2016

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Tarif pajak penghasilan pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25%.

2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

1. Pendekatan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.7 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah (Mardiasmo, 2016).

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.8 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yaitu berupa denda (pasal 7, Undang-undang No. 6 tahun 1983), bunga (Pasal 8, ayat 2 dan pasal 13 ayat 2, Undang-undang NO. 6, tahun1983), dan kenaikan (pasal 13, ayat 1,2,3 dan pasal 15 ayat 1,2, Undang-undang No. 6 tahun 1983).

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa kurungan (pasal 38, 39, dan 41 Undang-undang No. 6 tahun 1983), dan denda (pasal 38, 39, dan 41 Undang-undang N0.6 tahun 1983).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut Mardiasmo (2011) "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Menurut Guritno Mangkosubroto (2012) bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah

2.4 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan (Ibnu Syamsi, 1994: 201) Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

2.4.1 Jenis-jenis Pajak Daerah

1. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan.

3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau kesamaan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

4. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.4.2 Pajak Daerah yang Dipungut Oleh Provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik namakendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2.4.3 Pajak Daerah yang Dipungut Oleh Kabupaten

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

- c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- d. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- g. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
- h. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- i. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.

2.5 Retribusi Daerah

Pengertian retribusi adalah suatu beban atau biaya yang diberikan kepada seseorang di dalam suatu negara yang mendapatkan layanan atau fasilitas tertentu. Retribusi lebih bersifat spesifik, misalnya seseorang mendapatkan layanan tertentu, maka dia wajib membayar retribusi secara rutin.

Menurut Marihot P. Siahaan (2012), "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2011) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Menurut Juli Panglima Saragih (2010) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Menurut Halim (2012), "retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah". Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

1. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu,

2. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha (Kadjatmiko,2012).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

2.5.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum

Jasa yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.

2.5.2 Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

2.5.3 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak

ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.5.4 Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya

retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

2.5.5 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

b. Keadilan

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

c. Kemampuan Administrasi

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

2.6 Sektor Pariwisata

Pariwisata telah dikenal di dunia sejak zaman prasejarah namun tentu saja pengertian pariwisata pada zaman itu tidak seperti saat ini (modern). Sejak dahulu kala bangsa-bangsa di dunia seperti Sumeria, Phoenisia, sampai dengan Romawi sudah melakukan perjalanan, namun tujuannya masih untuk berdagang, menambah pengetahuan ilmu hidup, ataupun ilmu politik. Selanjutnya setelah

modernisasi meluas di segala penjuru dunia, khususnya setelah terjadinya revolusi industri di Inggris, maka muncul *traveller-traveller* yang secara bergantian melakukan perjalanan pariwisata seperti yang kita kenal saat ini.

Sedangkan di Indonesia sendiri, pariwisata telah dikenal sejak zaman kerajaan–kerajaan yang menguasai wilayah nusantara, walaupun masih berkepentingan untuk saling menguasai, namun tidak dapat dipungkiri akan adanya pertukaran kebudayaan antar wilayah. Pariwisata modern Indonesia mulai dikenal sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Melalui *Vereeniging Toesristen Verker* (VTV) yang merupakan suatu badan atau *official tourist bureau*. Kedudukan VTV selain sebagai lembaga pariwisata juga bertindak sebagai *tour operator* atau *travel agent* pariwisata. Pada masa ini, badan pariwisata yang dibentuk oleh Belanda hanya memprioritaskan pada wisatawan kulit putih saja, sedangkan bagi pribumi sendiri diberikan pembatasan seperti dilakukan di sektor-sektor lainnya.

Pariwisata berasal dari dua kata yakni, Pari dan Wisata. Pari diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata *travel* dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut *tour*. (Yoeti, 2008).

Menurut Kodyat (2010) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya Burkart dan Medlik (2011) menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat

di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Sedangkan Wahab (2010) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi. Selain itu pariwisata juga disebut sebagai industri yang mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1969, ketika disadari bahwa industri pariwisata merupakan usaha yang dapat memberikan keuntungan pada pengusahanya. Sehubungan dengan itu Pemerintah Republik Indonesia sejak dini mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tanggal 6 Agustus 1969, menyatakan bahwa usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara (Yoeti, 2010).

Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

1. Harus bersifat sementara
2. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Mengingat pentingnya pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.

2.6.1 Jenis Pariwisata

Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, menurut James J. Spillane (2010) dapat juga dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut :

1. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian

2. Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata untuk rekreasi dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.

3. Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.

4. Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, *Asian Games*, dan *SEA Games* serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

5. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6. Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

2.6.2 Bentuk Pariwisata

Di dalam pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata ini dapat diklasifikasikan bentuknya ke dalam beberapa kategori berikut ini:

1. Menurut asal wisatawan

Dilihat dari asal wisatawan, apakah asal wisata itu dari dalam atau luar negeri. Jika dalam negara berarti bahwa sang wisatawan ini hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya (pariwisata domestik), sedangkan jika ia datang dari luar negeri dinamakan pariwisata Internasional.

2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing itu berarti memberi efek positif terhadap neraca pembayaran luar negara suatu yang dikunjungi wisatawan ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara keluar negeri memberikan efek negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri negaranya ini dinamakan pariwisata aktif.

3. Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang

bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksud.

4. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlahnya wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau dalam suatu rombongan. Maka timbullah istilah pariwisata tunggal dan rombongan.

5. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka katagori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api atau mobil.

2.6.3 Daerah Tujuan Wisata

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:

1. Objek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang untuk datang. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu.

2. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

3. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

4. Tata Laksana/Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah seperti:

- a. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran
- b. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusikannya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- c. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata.
- d. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.
- e. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan.

5. Masyarakat/Lingkungan

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan.

a. Masyarakat

Masyarakat di sekitar objek wisata yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat.

b. Lingkungan

Di samping masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan alam di sekitar objek wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan tercemar. Lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem fauna dan flora di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu perlu adanya upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata.

c. Budaya

harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi tiap wisatawan yang berkunjung. Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya ini pun kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi tiap wisatawan yang berkunjung.

2.6.4 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Menurut Hadinoto (2010), ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, diantaranya adalah:

1. Atraksi Wisata

Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan

sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

2. Promosi dan Pemasaran

Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.

3. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata)

Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum/ tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai tren perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

4. Transportasi

Pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.

5. Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

2.6.5 Dampak Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi

studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pariwisata tentu saja akan memberikan dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menimbulkan dampak atau pengaruh positif maupun negatif dan yang terkena dampak tersebut adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, serta sosial (Lenner dalam Mathieson & Wall, 2010).

Menurut Kusudianto (2011), bahwa suatu tempat wisata yang direncanakan dengan baik, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik. Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut. Akan tetapi apabila suatu objek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

2.6.6 Faktor yang Mendukung Peningkatan PAD dalam Sektor Pariwisata

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang di pandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang

dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Dilihat dari sisi PAD maka ada beberapa daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sehingga tidak dapat mengandalkan PAD-nya dari hasil sumber daya alam. Oleh karenanya pengembangan industri pariwisata suatu daerah menjadi alasan utama sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah setempat.

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam menyumbang sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara, juga dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karenanya, kontribusi pajak bagi pembangunan diharapkan tidak saja mendorong pembangunan satu wilayah saja, akan tetapi juga dapat mendorong pembangunan secara merata sampai di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Upaya pengembangan industri pariwisata daerah-daerah di Indonesia terutama dalam menghadapi otonomi daerah berkaitan erat dengan berbagai faktor. Oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor yang secara faktual berperan dalam pengembangan industri pariwisata khususnya di daerah-daerah, yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah *human resources development* diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang

sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Kondisi yang memprihatinkan ini memerlukan penanganan sedini mungkin dan berkesinambungan melalui program-program pendidikan dan pelatihan terutama dan disiplin ilmu pariwisata. Dengan demikian diharapkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia Indonesia semakin meningkat khususnya dalam sektor pariwisata sehingga memenuhi standarisasi internasional.

Profesionalisme sumber daya manusia Indonesia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global di mana sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam memiliki gagasan, inovasi dan etos kerja profesional. Tentu tidak mudah untuk memperoleh tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata paling tidak harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kepariwisataan, sehingga pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di daerah-daerah tujuan wisata berpengaruh positif pada perkembangan industri pariwisata daerah.

2. Promosi Kepariwisataan

Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah-daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Pada abad 21, di mana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia dengan jalan semakin meningkatkan promosi kepariwisataannya. Merosotnya jumlah wisatawan di daerah-daerah tujuan wisata selama ini merupakan bukti bahwa situasi dan kondisi politik suatu negara berdampak pada terganggunya seluruh kegiatan kepariwisataan.

3. Sarana dan Prasarana Kepariwisata

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi daerah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar internasional.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana di daerah-daerah tujuan wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata.

Sarana prasarana merupakan unsur pokok dalam kegiatan industri pariwisata. Apabila pembenahan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan ditelantarkan akan berakibat pada tidak tercapainya dampak

positif industri pariwisata dalam peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja dan sebagai pendorong pembangunan daerah.

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber PAD, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya.

2.6.7 Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan

Sektor Pariwisata

Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Seperti

terjadi pada sektor lain, kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata ada yang memberikan dampak langsung dan ada pula yang memberikan dampak tidak langsung. Selain dari hal diatas ada kemungkinan suatu kebijakan ekonomi pemerintah memberikan dampak langsung pada sektor lain tetapi dapat memberikan dampak tidak langsung bagi sektor pariwisata.

1. Peran Pemerintah

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata.
- b. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar.
- d. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan kuat mengapa pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pariwisata antara lain :

- a. Semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa dibanding yang lalu
- b. Merosotnya nilai ekspor di sektor non minyak
- c. Prospek pariwisata memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten

- d. Potensi alam maupun budaya yang dimiliki kaitannya sebagai modal dasar dalam perkembangan pariwisata

Kondisi ini secara faktual memosisikan sektor pariwisata menjadi penting peranannya dalam pembangunan nasional. Dimana tidak ada kegiatan ekonomi yang berdimensi luas ke semua sektor, tingkatan dan kepentingan seperti Pariwisata. Oleh karena itu adalah sangat vital untuk mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata dengan pembangunan nasional.

Adapun peran pemerintah dalam hal peningkatan PAD di sektor wisata antara lain :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata agar tidak kalah dengan wisata lainnya.
- b. Memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada masyarakat lokal dalam kepariwisataan.
- c. Mengembangkan SDM aparatur dan masyarakat bidang kewirausahaan.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana petugas di lapangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
- e. Melakukan pembenahan pada objek- objek wisata (wisata alam dan wisata budaya).
- f. Meningkatkan promosi wisata dengan membentuk badan promosi daerah ini adanya peran *stakeholder*, seperti persatuan *hotel, travel*, dan usaha jasa (Restoran atau Rumah Makan)
- g. Melakukan promosi pemasaran dengan menggunakan media cetak dan media elektronik.

Dampak positif yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas pengembangan pariwisata tersebut yakni berupa pajak daerah dan pajak

lainnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata memberikan kontribusi berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan lain-lain.

2. Peran Masyarakat

Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu objek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata. Dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat objek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola objek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup objek wisata dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

2.6.8 Peranan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan PAD

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berperan atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang

dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.

Menurut Hutabarat (2010), peranan pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

a. Peran Ekonomi

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

2. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja.

Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, *homestay*, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

b. Peran Sosial

Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

c. Peran Kebudayaan

1. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

2. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.

Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.

3. Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli.

Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

2.7 Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi penerimaan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara penerimaan sektor pariwisata terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu.

Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi sektor pariwisata tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Handoko (2013) bahwa analisis kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD dengan jalan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD, dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Sektor Pariwisata (Rp)}}{\text{Realisasi PAD (Rp)}} \times 100\%$$

2.8 Perkembangan Sektor Pariwisata

Menurut Marpaung (2002) perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata.

Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata. Pada waktu yang sama, ada nilai-nilai yang membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan. Sesuai dengan panduan, maka perkembangan pariwisata dapat memperbesar keuntungan sambil memperkecil masalah-masalah yang ada.

Tersedianya objek wisata dan daya tarik wisata merupakan salah satu syarat yang harus tersedia dalam pengembangan pariwisata. Karena objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Jadi, dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Toraja Utara harus memperhatikan potensi objek wisata yang ada serta daya tarik wisata yang tersedia.

2.9 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Menurut Robinson Tarigan (2009), Produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*).

Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya, akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar.

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (*input*) menjadi produk (*output*) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dsb, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto.

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar daerah/wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur) yang dimiliki penduduk daerah/wilayah yang bersangkutan.

Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu daerah/wilayah, maka antara produk domestic.

Perkembangan PDRB didasarkan atas beberapa faktor yaitu :

a. Perubahan Harga

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang diakibatkan oleh perubahan harga yang terjadi di pasar. Pada umumnya harga tersebut cenderung menaik sehingga pendapatan regional atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kenaikan

b. Perubahan Riil

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang dihitung berdasarkan perubahan riil, artinya tidak termasuk lagi perubahan harga. Pengertian yang umum digunakan para ekonom yaitu pendapatan yang telah dihilangkan pengaruh inflasinya. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Pendapatan regional yang terakhir inilah pada umumnya banyak dimanfaatkan oleh para birokrat, peneliti dan para ekonom.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada data yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan pengambilan data berupa data anggaran yang dimiliki oleh PAD, data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Dan data primer didapatkan melalui wawancara untuk memperoleh hasil yang valid.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pencari pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data.

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan kevalidatan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan kehadiran ditempat penelitian untuk memperoleh data atau keteranga-keterangan yang benar-benar valid.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan peneltian guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan proposal ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian

dengan sektor pariwisata sebagai salah satu aspek yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Lokasi penelitian ini dilakukan di sekitaran tempat wisatawan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

3.4 Sumber Data

Dalam hal ini, Arikunto (2006) membagi data menjadi tiga kelompok besar yaitu:

1. *Person* atau sumber data yang berupa memiliki kompetensi terhadap masalah yang diteliti.
2. *Place* atau tempat dan alat yang digunakan dalam penelitian atau kinerja dan aktifitas yang ada di dalamnya.
3. *Paper* atau data yang bersumber dari dokumen.

Dalam penelitian ini, lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa *person* atau responden sebagai informan yang dimana informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*), dengan cara bola salju (*snow ball*) yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan responden yang berada dalam sekitaran tempat wisata , yang termasuk wisatawan.

b. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan serta membaca sumber, berupa literatur-literatur hasil penelitian dan catatan ilmiah yang berisikan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Metode lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumbernya yakni dari beberapa instansi terkait.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)

Analisis ini dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data atau informasi sampai pada tahap penulisan laporan.

b. Analisis kontribusi

Menurut Handoko (2013) analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari sektor pariwisata terhadap PAD.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Sektor Pariwisata (Rp)}}{\text{Realisasi PAD (Rp)}} \times 100\%$$

3.7 Pengecekan Validitas Data

Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan peneliti, Afrizal (2015). Untuk

memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dimana prinsip triangulasi ini adalah informasi mesti dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber atau informan-informan yang berbeda agar tidak bias. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data atau informasi yang diperoleh peneliti.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang pertama kali peneliti lakukan yaitu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ke informan. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke beberapa informan dengan pertanyaan yang sama yang nanti peneliti gunakan untuk mengembangkan desain penelitian dan kemudian berlanjut pada penelitian sebenarnya hingga pada penulisan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja.

Kabupaten Toraja Utara secara geografis terletak pada 2 40' LS sampai 3 25' LS dan 119 30' BT sampai 120 25' BT, dengan batas wilayahnya :Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi, Kecamatan Walerang, Kecamatan Wana Barat, dan Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbongan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, kecamatan Makale Utara, dan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja.

Kabupaten Toraja Utara memiliki luas 1.151,47 Km² yang terbagi dalam 151 Desa / Kelurahan dan 21 Kecamatan :

Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

1. Kecamatan Rantepao
2. Kecamatan Sesean
3. Kecamatan Nanggala
4. Kecamatan Rinding Allo
5. Kecamatan Buntao'

6. Kecamatan Sa'dan
7. Kecamatan Sanggalangi'
8. Kecamatan Sopai
9. Kecamatan Tikala
10. Kecamatan Balusu
11. Kecamatan Tallunglipu
12. Kecamatan Dende' Piongan Napo
13. Kecamatan Buntu Pepasan
14. Kecamatan Baruppu'
15. Kecamatan Kesu'
16. Kecamatan Tondon
17. Kecamatan Bangkelekila
18. Kecamatan Rantebua
19. Kecamatan Sesean Suloara
20. Kecamatan Kapala Pitu
21. Kecamatan Awan Rante Karua

Dan berikut nama-nama pejabat bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Toraja Utara hingga sekarang :

1. Drs. Y.S Dalipang (Periode 26 -11-2008 s/d 23-5-2010)
2. Drs. H. Tautoto Tana Ranggina Sarongallo, M.Si. Caretaker Bupati Toraja Utara (Februari 2010)
3. Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM Bupati Toraja Utara dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd. Wakil Bupati Toraja Utara (31 Maret 2011)
4. Dr. Kalatiku Paembonan , M.Si Bupati Toraja Utara dan Y. Rinto Kadang, S.T Wakil Bupati Toraja Utara (Periode 2016-2021)

4.2 Perkembangan Alokasi Anggaran Pariwisata dalam Belanja Daerah Sektor Pariwisata

Dalam mengembangkan pariwisata, banyak keuntungan yang dapat diperoleh, namun semuanya kembali kepada kesiapan daerah masing-masing untuk terus-menerus mengembangkan daerahnya sebagai salah satu daerah pariwisata. Dalam mengembangkan pariwisata, ada beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata yaitu; mengencangkan promosi, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Dibawah ini menunjukkan pengeluaran pemerintah dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah melalui kegiatan-kegiatan wisata.

Berdasarkan tabel berikut, menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara sejak tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2015 senantiasa mengalami peningkatan. Anggaran Pendapatan Daerah terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp.502.777 juta dan yang tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.1.129.005 miliar.

Tabel 4.1 Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Sektor Pariwisata 2008-2015
(Juta rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
1	2008	502,777	
2	2009	837,190	66.51%
3	2010	921,331	10.50%
4	2011	1,001,421	8.69%
5	2012	1,012,311	1.09%
6	2013	1,093,282	8.00%
7	2014	1,129,005	3.27%
8	2015	1,023,384	-9.36%

Sumber : DPKD Toraja Utara

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi APBD sektor pariwisata pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang besar yaitu Rp. 1.129.005 juta dengan persentase peningkatan sebesar 3,27%. Sebaliknya realisasi terendah APBD sektor pariwisata terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 502.777 juta. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi pemekaran kabupaten dimana Rantepao yang tadinya masuk dalam Kabupaten Tana Toraja kini telah menjadi Kabupaten Toraja Utara sehingga dalam pelaporan APBD juga telah terpisah.

4.3 Perkembangan Jumlah Wisatawan

Kabupaten Toraja Utara yang merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Sulawesi Selatan memiliki daya tarik yang cukup besar, baik yang bersifat budaya, alam, maupun buatan. Salah satu daya tarik budaya yang banyak di kenal di kabupaten Toraja Utara adalah upacara Rambu Solo'.

Tabel berikut menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata ini selalu mengalami peningkatan terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung dari tahun 2008 sampai tahun 2015.

Tabel 4.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Toraja Utara

No	Tahun	Jumlah Wisatawan (Jiwa)	Peningkatan (%)
1	2008	18262	
2	2009	11102	-39.21%
3	2010	24983	125.03%
4	2011	26150	4.67%
5	2012	30494	16.61%
6	2013	45373	48.79%
7	2014	50837	12.04%
8	2015	61283	20.55%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara

Hal ini dapat dilihat pada data di atas yang memperlihatkan peningkatan jumlah wisatawan delapan tahun tersebut. Jumlah kunjungan wisatawan

tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 61.283 jiwa dengan persentase peningkatan sebesar 20,55%, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 11.102 jiwa namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Toraja Utara.

4.3.1 Pelayanan Sektor Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara

Penelitian dilakukan dengan melaksanakan wawancara bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel dimanapun didapatkan tanpa syarat pengambilan tertentu. Hasil dari sampling tersebut memiliki sifat yang objektif. Wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan dan pernyataan. Hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu wisatawan yang mengunjungi objek wisata di Kabupaten Toraja Utara diketahui bahwa pelayanan wisatawan selama berkunjung ke Tana Toraja telah meningkat. Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia di objek wisata.
- b. Hambatan dalam akses angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk mencapai objek wisata.
- c. Kualitas pelayanan yang belum optimal kepada pengunjung objek wisata.
- d. Informasi tentang objek wisata di Kabupaten Toraja Utara belum sepenuhnya dengan mudah dapat diperoleh dari berbagai macam sumber.

4.4 Perkembangan Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Toraja Utara

Pendapatan asli daerah atau PAD adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, setiap daerah akan selalu berusaha mengoptimalkan PAD melalui kebijakan yang efektif. Seperti halnya sektor-sektor yang lain, sektor pariwisata juga memegang peranan penting dalam kontribusinya terhadap PAD kabupaten toraja utara. Pemerintah kabupaten toraja utara menetapkan target dan realisasi penerimaan yang hendak dicapai untuk setiap komponen PAD baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun PAD yang sah.

Hasil analisis data terhadap realisasi PAD kabupaten toraja utara dari unit organisasi dinas pariwisata dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Toraja Utara dari unit organisasi Dinas Pariwisata 2008-2015

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Sektor Pariwisata (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi
1	2008	250.000.000	279.178.000	89.55%
2	2009	298.000.000	289.730.000	102.85%
3	2010	298.000.000	290.830.000	102.47%
4	2011	300.000.000	322.795.000	92.94%
5	2012	350.000.000	342.197.500	102.28%
6	2013	400.000.000	350.784.000	114.03%
7	2014	455.000.000	412.387.000	110.33%
8	2015	500.000.000	570.008.000	87.72%
Jumlah		2.851.000.000	2.857.909.500	

Sumber : Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Toraja Utara berasal dari retribusi daerah berupa retribusi tempat rekreasi. Retribusi ini berasal dari beberapa objek wisata baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata agro yang banyak di kunjungi oleh para wisatawan dan

telah memiliki retribusi, namun masih terdapat beberapa objek wisata yang sebenarnya sudah dikunjungi oleh para wisatawan tetapi belum dikelola sepenuhnya sehingga belum dilakukan pungutan retribusi.

Adapun realisasi yang tidak mencapai target dikarenakan minimnya dana yang dibutuhkan, sehingga mempengaruhi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara. Masalah anggaran memang merupakan hal yang menyulitkan. Sumber daya non manusia ini dianggap sangat minim, sehingga hampir semua program kerja selalu terkendala.

Anggaran merupakan bagian dari program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Kondisi keuangan lambatnya dana dikucurkan sangat berdampak terhadap pelaksanaan rencana strategi dalam hal ini program.

Hal ini dipengaruhi oleh intensitas kunjungan para wisatawan ke setiap objek wisata. Semakin tinggi intensitas wisatawan mengunjungi objek wisata, maka retribusi yang disetor ke pemerintah daerah juga akan meningkat. Berikut tabel dibawah ini menunjukkan besaran setoran dari pihak pengelola objek wisata kepada pemerintah.

Tabel 4.4 Penerimaan dari Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara tahun 2015

No	Nama Objek Wisata	Setoran
1	Ke'te' Kesu'	75,658,000
2	Londa	45,106,000
3	Kolam Alam Limbong	2,320,500
4	Kalimbuang Bori'	4,020,000
5	Penanian Nanggala	560,000
6	To'barana'	840,000
7	Pallawa	1,662,000
8	Galugu Dua	1,005,000
9	Marante	1,885,000
10	Museum Landorundun	85,000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan data pada tabel di atas, objek wisata yang memberikan kontribusi setoran terbesar adalah objek wisata Ke'te Kesu dengan total setoran Rp 75.658.000. Disusul objek wisata budaya Londa dengan total setoran Rp45.106.000. Menurut bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, objek wisata Ke'te Kesu' dan Londa memberikan kontribusi setoran terbesar karena kedua objek wisata ini merupakan objek wisata paling diminati oleh para wisatawan, sebab kedua objek wisata ini menawarkan dua jenis wisata sekaligus yakni wisata budaya berupa pewarisan budaya Tana Toraja melalui pekuburan batu serta wisata alam berupa gua-gua alam.

4.5 Perkembangan PDRB Sektor Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Sementara itu, potensi ekonomi pada suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Perkembangan Produk Domestik regional Bruto (PDRB), Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun terus

membalik. Hal ini dapat terlihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara lengkap perkembangan PDRB tahun 2008–2015 ditampilkan pada tabel berikut dimana nilai PDRB tahun 2010–2011 terjadi penurunan nilai PDRB. Ini tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi tetapi pada tahun tersebut terjadi pemekaran kabupaten dimana Rantepao yang tadinya masuk dalam Kabupaten Tana Toraja kini telah menjadi Kabupaten Toraja Utara sehingga dalam pelaporan PDRB juga telah terpisah. Pada tahun 2013 PDRB harga konstan mencapai 152.666.000 juta rupiah sedangkan di tahun 2014 menjadi 250.441.000 juta rupiah, sama dengan PDRB 2014 ke 2015 terjadi peningkatan meskipun tidak sebanding dengan peningkatan tahun 2013 ke 2014. Dari data ini dapat diinterpretasikan bahwa Kabupaten Toraja Utara selama periode 2008–2015 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dari tabel berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2015 PDRB sektor pariwisata Toraja Utara mengalami peningkatan. Namun berbeda dengan PAD sektor pariwisata yang mengalami perubahan pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan dari total Rp. 736.117 juta menjadi Rp.270.648 juta.

Tabel 4.5 Perbandingan PDRB Sektor Pariwisata dan PAD dari Sektor Pariwisata Toraja Utara Periode 2008-2015

Tahun	PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (Jt Rp)	PAD Sektor Pariwisata (Jt Rp)
2008	111,886	925,890
2009	106,760	736,117
2010	127,102	270,648
2011	118,129	453,667
2012	138,533	355,906
2013	152,666	280,745
2014	250,441	491,921
2015	263,620	669,188

Sumber : DPPKAD Kab.Toraja Utara

Pada tahun 2013-2014 kenaikan PDRB disertai dengan kenaikan PAD sebesar yaitu PDRB Rp.152.666 juta menjadi Rp.250.441 juta sedangkan PAD Rp.280.745 juta menjadi Rp.491.921 juta. Peningkatan PAD di Kabupaten Toraja Utara yang besar di tahun 2013-2014 disebabkan gencarnya pemerintah melakukan promosi wisata dan pada saat itu diadakan *Lovely December* yang dihadiri oleh para perantau Toraja dari berbagai daerah, para wisatawan domestik maupun mancanegara yang bertujuan menyaksikan acara tersebut dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah.

Tabel tersebut juga menunjukkan nilai PDRB tahun 2008-2009 terjadi penurunan dari Rp.111.886 juta menjadi Rp.106.760 juta, sedangkan PAD sektor pariwisata dari Rp.925.890 juta menjadi Rp. 736.117 juta. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penerimaan daerah tetapi pada tahun tersebut terjadi pemekaran kabupaten dimana Rantepao yang tadinya masuk dalam Kabupaten Tana Toraja kini telah menjadi Kabupaten Toraja Utara sehingga dalam pelaporan PDRB dan PAD juga telah terpisah. Dari data ini dapat diinterpretasikan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode 2008–2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

4.6 Potensi Sarana dan Prasarana Wisata Di Kabupaten Toraja Utara

Prasarana penunjang pariwisata adalah bangunan, alat dan/atau pelayanan umum yang merupakan unsur-unsur pokok untuk melayani kebutuhan masyarakat dan melandasi pembangunan wilayah seperti : jalan, penyediaan air, listrik. Sementara itu, sarana pariwisata berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2010 tentang kepariwisataan, menyangkut penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta, serta kawasan wisata yang dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.

Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara antara lain :

- a. Sarana Akomodasi
 - Hotel Berbintang : 11 buah
 - Hotel melati : 20 buah
- b. Rumah makan / Restaurant : 18 buah
- c. Karaoke / café : 12 buah
- d. Travel / biro perjalanan wisata : 8 buah
- e. Tourist information center : 1 buah

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara, pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mengeluarkan kebijakan pengembangan pariwisata yang mencakup kebijakan pokok, kebijakan pengembangan perwilayahan (keruangan/spasial), pengembangan produk wisata, pengembananagan pasar dan pemasaran, serta pengembangan SDM dan kelembagaan untuk lingkup Kabupaten Toraja Utara.

Kebijakan Pokok Pengembangan Pariwisata :

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan aparatur dinas kebudayaan dan pariwisata ini dengan diadakannya MICE (*meetings, incentives, conferencing and exhibitions*).
- b. Melaksanakan kerjasama kebudayaan dan pariwisata antar daerah dan dunia usaha. Kerjasama yang dilakukan oleh Toraja Utara adalah untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Toraja Utara.
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata dan pelestarian budaya. Secara umum,

objek wisata yang ada di kabupaten Toraja Utara, belum sepenuhnya dikelola oleh dinas kebudayaan dan pariwisata seperti yang dikatakan oleh staf dinas kebudayaan dan pariwisata dalam wawancara sebagai berikut :

“...saat ini masih banyak objek wisata yang sepenuhnya adalah milik keluarga/perorangan, bukan milik pemerintah, jadi kami dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata hanya memonitoring dan menerbitkan tiket/karcis retribusi masuk bagi objek wisata tersebut...”

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini ialah membenahi segala sesuatu yang ada di objek wisata seperti penambahan tempat-tempat sampah, WC umum, papan informasi bagi wisatawan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dinas kebudayaan dan pariwisata juga memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat yaitu dengan memberikan izin pembangunan toko-toko souvenir dan tempat mengukir di dalam objek wisata tersebut.

Pengembangan produk wisata Toraja Utara berorientasi pada potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh budaya , seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Produk wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-tema wisata minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing.

Dalam pengembangan produk wisata ini, diperlukan penetapan produk wisata andalan bagi Kabupaten Toraja Utara sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di tingkat regional, nasional dan internasional, seperti dikutip dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berikut:

"... saat ini, yang menjadi produk wisata andalan adalah objek wisata kuburan batu Ke'te' Kesu', kuburan batu Londa, Wisata Kolam Alam Limbong, Kalimbuang Bori', Pallawa " jelasnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada wisatawan, baik wisatawan lokal dan mancanegara dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan dan pengembangan pariwisata Toraja Utara diantaranya :

a. Sarana dan Prasarana di Sektor Pariwisata

Tidak semua objek wisata terletak di pinggir jalan poros. Sebagian objek terletak jauh dari pusat kota, oleh karena itu jalan menuju beberapa objek wisata ini masih ada yang kurang baik, misalnya saja jalan menuju objek wisata Lolai yang akses jalannya masih berbatu-batu. Hal ini tentu saja sangat mengganggu dan membahayakan bagi para wisatawan yang ingin mengunjunginya. Dalam wawancara dengan wisatawan lokal, mereka sangat terganggu dengan keadaan jalan menuju objek wisata ini. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini karena sangat mengurangi kenyamanan dan tentu saja membahayakan.

Belum diperbaikinya jalan menuju beberapa objek wisata ini, dikatakan oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, karena kurangnya dana untuk perbaikan jalan dan juga kondisi alam yang di musim hujan kadang terjadi tanah longsor sehingga menutupi ruas jalan menuju objek wisata tersebut, seperti dalam kutipan wawancara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berikut :

"... kami memang mengupayakan perbaikan jalan yang rusak menuju objek-objek wisata, namun masih terkendala dengan dana yang minim. Jadi kami hanya berharap agar wisatawan atau masyarakat berhati-hati menuju objek

wisata agar tidak terjadi kecelakaan jika melewati jalan yang berbatu-batu dan aspal yang berlubang tersebut, menunggu perbaikan jalan nantinya...”

b. Investasi di Sektor Pariwisata

Untuk saat ini, kurangnya minat investor menanamkan modalnya terjadi salah satunya disebabkan karena lahan/tanah yang ada di Toraja Utara tidak hanya satu orang yang menjadi pemiliknya. Lahan/tanah tersebut adalah milik lebih dari satu orang karena merupakan tanah keluarga. Ini sangat mempersulit untuk penjualannya jika ada investor atau orang yang mau membelinya untuk kebutuhan berusaha. Begitu juga dengan sawah, kebanyakan orang toraja menganggap bahwa memiliki sawah merupakan sebuah kebanggaan atau bisa meningkatkan prestise sehingga mereka tidak mau menjualnya. Hal berikutnya adalah beberapa kebudayaan di toraja mulai berkurang keasliannya atau keorisinalitasnya seperti yang dikatakan salah seorang staf dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Toraja Utara.

“...saat ini beberapa dari kebudayaan di Toraja Utara sudah tidak orisinil lagi. Misalnya saja rumah adat toraja yaitu tongkonan. Dulu, atap rumah tongkonan itu terbuat dari kayu sehingga terlihat sangat unik, namun sekarang sudah ada yang menggunakan atap seng. Begitu juga dengan lantainya yang dulunya masih menggunakan kayu, sekarang sudah memakai keramik..”

c. Keterbatasan Dana Pengembangan Pariwisata

Sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Toraja Utara membutuhkan dana yang besar untuk pengembangan pariwisatanya, namun kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana seperti dikatakan oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam wawancara sebagai berikut :

“...80 % anggaran yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara digunakan untuk pembangunan fisik atau untuk membangun objek wisata, padahal sangat dibutuhkan anggaran lebih besar untuk pelestarian kebudayaan, pelaksanaan event tahunan seperti acara *Lovely December* dan promosi kepariwisataan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara sejak tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2015 senantiasa mengalami peningkatan. Anggaran Pendapatan Daerah terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp.502.777 juta dan yang tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.1.129.005 miliar.
- b. Jumlah wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Jumlah kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 61.283 jiwa, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 11.102 jiwa.
- c. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber, objek wisata yang memberikan kontribusi setoran terbesar adalah objek wisata Ke'te Kesu dengan total setoran Rp 75.658.000. Disusul objek wisata Londa dengan total setoran Rp 45.106.000.
- d. Perkembangan Produk Domestik regional Bruto (PDRB), Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun terus membaik. Hal ini dapat terlihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

- a. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata menuju peningkatan pengembangan pariwisata, perlu melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mendorong kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila pengelolaan pariwisata dilakukan dengan mencermati permintaan wisatawan, meningkatkan posisi tawaran potensi wisata dan meningkatkan pemasaran wisata melalui promosi wisata.
- b. Objek-objek wisata di Kabupaten Toraja Utara masih memerlukan pembenahan disamping anggaran yang dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyediaan akomodasi dan fasilitas wisata yang masih terbatas perlu ditingkatkan.
- c. Agar pengembangan sektor pariwisata dapat lebih terarah diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara melakukan pengkajian yang dapat mendukung langkah-langkah dan kebijakan serta penyusunan program pengembangan kepariwisataan secara terpadu di Kabupaten Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anne Ahira. (2012). *Pengertian Kontribusi*. Diambil tanggal 1 September 2016 pukul 21.20 WIB dari <http://www.anneahira.com/kontribusi.html>
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Boediono. (2011). *Ekonomi Makro*. (Online) Edisi-4. penerbit BPFE, Yogyakarta. (<http://digilib.unila.ac.id/9991/16/BAB%20II.pdf>, diakses 16 Juni 2016)
- Brotodihardjo, R.Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Burkart, A.J. dan Medlik, S. 2011. *Tourism, Past, Present, and Future*. London.
- Djasudarma, Hj. T. Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadinoto, Kusudianto. 2010. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press.
- Halim, Abdul Halim, 2012, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Edisi Pertama, Jakarta.
- Hutabarat, R.V. 2010. *Pengaruh Pengembangan Pariwisata pada Perekonomian Indonesia: Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM [disertasi]*. (Online) Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/10278/H06fra.pdf;jsessionid=F99AD8C632F68056A864CFB7B484EFFF?sequence=4>, diakses 17 Juni 2016)
- Kadajtmiko, 2012. "Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah", Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Kodyat, H. 2010. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kusudianto, Hadinoto. 2011. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Penerbit UI: Jakarta
- Mangkoesebroto, Guritno, 2012. *Ekonomi publik*, Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, edisi 18, Andi, Yogyakarta
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung : Alfabet

- Mathieson, Alister dan Wall, Geoffrey, (2010), *Tourism: Economic, physical, and social impacts*, Longman (London and New York)
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Oka. A. Yoeti. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita
- Saragih, Juli Panglima. 2010. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. (Online) Penerbit Ghalia. Jakarta.
(<http://digilib.unila.ac.id/9991/16/BAB%20II.pdf>, diakses 16 Juni 2016)
- Siahaan, P. Marihot, 2012, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Online) PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28560/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 16 Juni 2016)
- Spillane, James J. (2010). *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syamsi, Ibnu. (2011). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. (Online) Jakarta: Rineka Cipta. (<http://lib.unnes.ac.id/513/1/1174.pdf>, diakses 21 Juni 2016)
- Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional*. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Wahab, Saleh Ph.d, *Manajemen Pariwisata*, PT Pradya Paramitha, Jakarta, 2010
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S.
- Yoeti, Oka A. 2010. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.
- Undang-undang RI :
- Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengkata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN

- a. Narasumber : Drs. Innosentius Rantepasan, M.M (Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Hasil Wawancara:

1. Bagaimana alokasi anggaran pariwisata dalam rangka pembangunan dan perbaikan sektor pariwisata ?

Jawab :

“...80 % anggaran yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara digunakan untuk pembangunan fisik atau untuk membangun objek wisata, padahal sangat dibutuhkan anggaran lebih lebih besar untuk pelestarian kebudayaan, pelaksanaan event tahunan seperti acara *Lovely December* dan promosi kepariwisataan.

2. Bagaimana perkembangan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Toraja Utara ?

Jawab :

“...setiap tahun pengunjung yang datang mengalami peningkatan, terlebih pada musim liburan pada bulan Agustus dan Desember semua tempat objek wisata dipenuhi oleh para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing..”

3. Dalam pengembangan sektor pariwisata, produk wisata apa saja yang saat ini menjadi andalan bagi Kabupaten Toraja Utara sebagai faktor penarik utama pengembangan pariwisata ?

Jawab :

"... saat ini, yang menjadi produk wisata andalan adalah objek wisata kuburan batu Ke'te' Kesu', kuburan batu Londa, Wisata Kolam Alam Limbong, Kalimbuang Bori', Pallawa "

4. Bagaimana upaya pemerintah dalam rangka perbaikan sarana transportasi yang dalam hal ini adalah perbaikan akses jalan untuk menuju ke tempat wisata ?

Jawab :

"... kami memang mengupayakan perbaikan jalan yang rusak menuju objek-objek wisata, namun masih terkendala dengan dana yang minim. Jadi kami hanya berharap agar wisatawan atau masyarakat berhati-hati menuju objek wisata agar tidak terjadi kecelakaan jika melewati jalan yang berbatu-batu dan aspal yang berlubang tersebut, menunggu perbaikan jalan nantinya..."

- b. Narasumber : Ir. Daud K. Tangdilintin, M.T (Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara)

Hasil Wawancara :

1. Apa usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata dan pelestarian budaya ?

Jawab :

"...saat ini masih banyak objek wisata yang sepenuhnya adalah milik keluarga/perorangan, bukan milik pemerintah, jadi kami dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata hanya memonitoring dan menerbitkan tiket/karcis retribusi masuk bagi objek wisata tersebut..."

2. Produk wisata apa saja yang saat ini sudah mulai berkurang keasliannya ?

Jawab :

“...saat ini beberapa dari kebudayaan di Toraja Utara sudah tidak orisinil lagi. Misalnya saja rumah adat toraja yaitu tongkonan. Dulu, atap rumah tongkonan itu terbuat dari kayu sehingga terlihat sangat unik, namun sekarang sudah ada yang menggunakan atap seng. Begitu juga dengan lantainya yang dulunya masih menggunakan kayu, sekarang sudah memakai keramik..”

c. Narasumber : Wisatawan

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana pelayanan tempat objek wisata di Kabupaten Toraja Utara ?

Jawab :

“...saat ini pelayanan di semua tempat objek wisata telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pengunjung yang datangpun semakin meningkat dikarenakan pelayanan dan pemandangan di sekitar objek wisata yang memuaskan...”

2. Apa saja kendala yang dihadapi selama berada di tempat wisata ?

Jawab :

“...saat ini kendala yang dihadapi cukup lumayan dikarenakan belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan di tempat wisata, adanya hambatan akses transportasi untuk menuju ke tempat wisata, pelayanan yang kurang optimal apabila pengunjung yang datang memenuhi tempat wisata, dan kurangnya informasi mengenai tempat-tempat wisata yang masih belum dipublikasikan oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara...”